

I. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 disebutkan bahwa pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan merujuk pada pengertian itu, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun dokumen perencanaan strategis yang memuat rencana strategis dalam suatu dokumen sistemik yang menjadi panduan pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun kedepan dalam sebuah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2021.

Dokumen Penyusunan Dokumen Renstra DPUPR Tahun 2017 – 2021 ini disusun sebagai sebuah dokumen acuan yang didasari atas persepsi positif atas kemampuan dan sasaran yang lebih realistis dan tetap memperhatikan substansi kebijakan pembangunan infrastruktur secara makro di kabupaten wonosobo. Selain berdasarkan amanah RPJMD Kabupaten Wonosobo, berbagai isu strategis Kabupaten Wonosobo menjadi warna dalam pengembangan teknis pembangunan infrastruktur seperti Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Kabupaten Wonosobo Ramah Anak, Penetapan Kawasan Strategis Nasional Borobudur - Dieng dan upaya penerapan harmonisasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

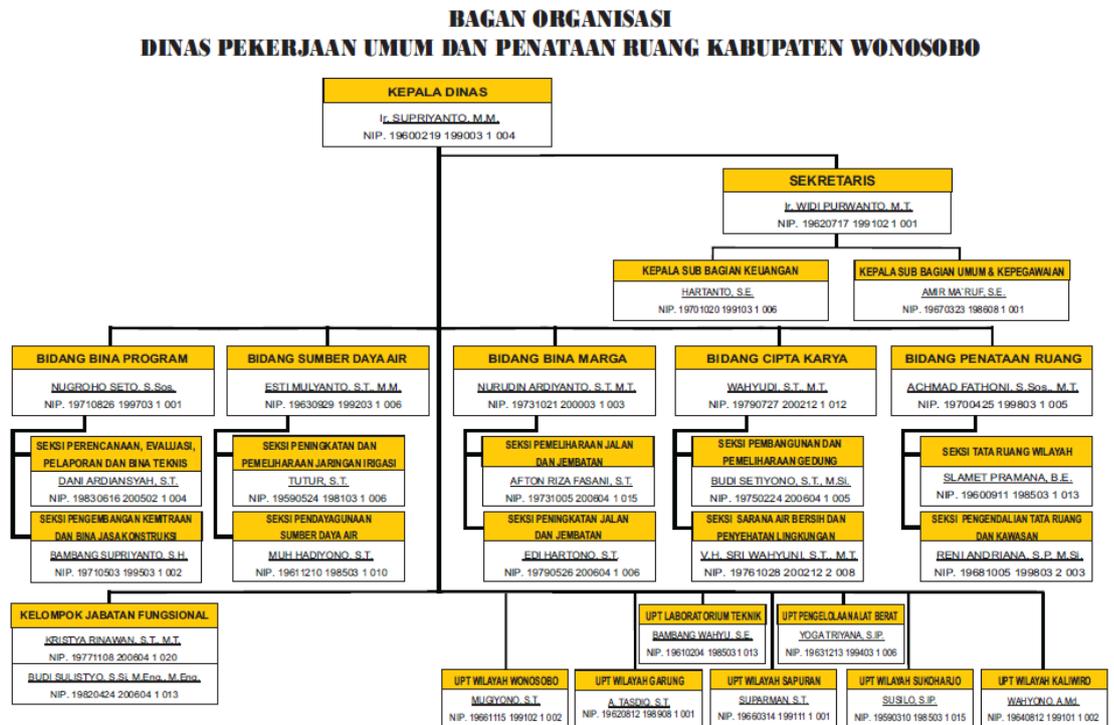
A. KONDISI

1. Kondisi Internal

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo telah ditentukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dinas type B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perda ini telah membawa atmosfer baru dalam upaya pengimplementasian infrastruktur, pendekatan wawasan tata ruang dalam satu lembaga kedinasan telah menjelaskan fungsi infrastruktur sebagai modal dasar pembangunan dan instrumen pengendalian dan pembinaan pengembangan wilayah.

Perda diatas telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari jajaran pejabat struktural dan jajaran pejabat fungsional. Secara struktur organisasi Dinas PUPR terdiri dari 1 (satu) orang kepala dinas, 1 (satu) orang sekretaris dinas yang membawahi 2(dua) subbagian, 5 (lima) bidang teknis yang membawahi 10 (sepuluh) seksi dan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis.

Struktur Organisasi sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Wonosobo



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Lebih jauh kedalam, potret Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo dapat dirinci ke dalam tabel menurut kategori sebagai berikut :

(1) Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

Unit Kerja	Jumlah Pegawai			
	Pejabat	Staf PNS	Staf Non PNS	Total
Kepala	1	1	1	3
Sekretaris	1	2	1	4
Kepala Subbag Keuangan	1	9	3	13
Kepala Subbag Umum & Kepegawaian	1	17	8	26
Kepala Bidang Bina Program	1			1
Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Bina Teknis	1	1	2	4
Seksi Pengembangan Kemitraan dan Bina Jasa Konstruksi	1	2	1	4
Kepala Bidang Bina Bina Marga	1			1
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	4	2	7
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan	1	3	3	7
Kepala Bidang Cipta Karya	1			1
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung	1	6	1	8
Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	1	5	2	8
Kepala Bidang Sumber Daya Air	1			1
Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1	3	2	6
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air	1	6	1	8
Kepala Bidang Penataan Ruang	1			1

Seksi Tata Ruang Wilayah	1	2	2	5
Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan	1	4	2	7
UPT Pengelolaan Alat Berat	1	3	10	14
UPT Laboratorium Teknik	1	0	3	4
UPT Wilayah Wonosobo	1	6	11	18
UPT Wilayah Garung	1	5	6	12
UPT Wilayah Kaliwiro	1	3	4	8
UPT Wilayah Sapuran	1	6	4	11
UPT Wilayah Sukoharjo	1	7	6	14
Jabatan Fungsional	2	0	0	2
JUMLAH	28	95	73	198

(2) Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Sarjana Strata 2 (S2)	11	8,94
2	Sarjana Strata 1 (S1)/ (D/IV)	22	17,89
3	Sarjana Muda /Diploma	6	4,88
4	SMA/SMK	50	40,65
5	SLTP	15	12,20
6	SD/MI	19	15,45
JUMLAH		123	100,00

(3) Pegawai PNS Berdasarkan Eselon

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Eselon

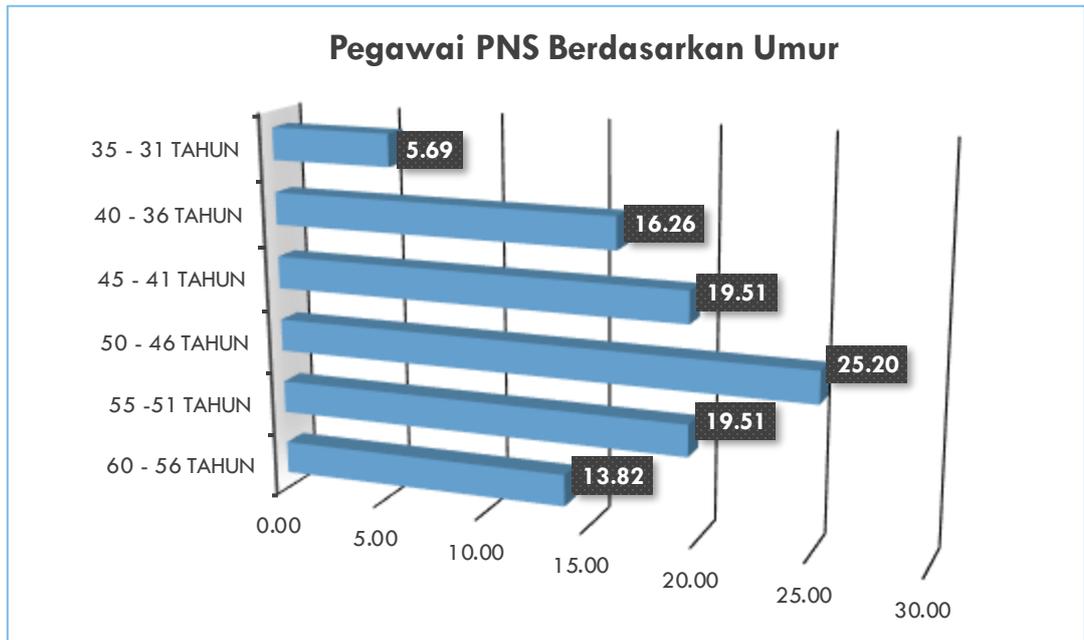
No	Eselon	Jumlah Pegawai	%
1	Eselon 2B	1	0,81
2	Eselon 3A	1	0,81
3	Eselon 3B	5	4,07
4	Eselon 4A	17	13,82
5	Non Eselon	99	80,49

JUMLAH	123	100,00
--------	-----	--------

(4) Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4 Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	%
1	Pembina Utama Muda/ Ivc	1	0,81
2	Pembina Tingkat 1 / Ivb	1	0,81
3	Pembina / Iva	6	4,88
4	Penata Tk. 1 / III d	10	8,13
5	Penata / III c	11	8,94
6	Penata Muda Tk. 1 / III b	18	14,63
7	Penata Muda / III a	6	4,88
8	Pengatur Tk. 1 / II d	5	4,07
9	Pengatur / II c	27	21,95
10	Pengatur Muda Tk. 1 / II b	4	3,25
11	Pengatur Muda / II a	14	11,38
12	Juru Tk. 1 / I d	1	0,81
13	Juru / I c	16	13,01
14	Juru Muda Tk. 1 / I b	2	1,63
15	Juru Muda / I a	1	0,81
JUMLAH		123	100,00

(5) Pegawai PNS Berdasarkan Umur

Gambar 1.2 Diagram Batang Pegawai PNS Berdasarkan Umur

2. Kondisi Eksternal

Kabupaten Wonosobo tidak dapat lepas dari tuntutan masyarakat baik terhadap kualitas maupun kualitas layanan dan juga kebijakan regional dan nasional. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah salah satu aspek legal yang sangat kuat mewarnai implementasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo selain upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamahkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo.

Komitmen terhadap pemenuhan Akses universal (Universal acces)100-0-100 merupakan program nasional bidang keciptakaryaan untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dengan mencapai akses pelayanan air bersih hingga 100 %, pengurangan kawasan kumuh hingga 0% dan peningkatan pelayanan akses sanitasi hingga 100%. Sasaran yang ingin dicapai program 100-0-100 yaitu:

- Terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, menuju Kota Tanpa Kumuh yang didukung dengan tata bangunan dan lingkungan yang berkualitas, layak huni, produktif dan berjiwa diri.

- Terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan).

Dalam tataran nasional regional, Kabupaten Wonosobo harus terus menyiapkan diri sebagai daerah pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Dieng. Maka infrastruktur diharapkan difokuskan untuk menyokong kebijakan tersebut sekaligus merupakan upaya menjembatani efek dari penetapan kawasan strategis nasional tersebut baik dampak maupun impact yang mungkin terjadi bagi perkembangan Kabupaten Wonosobo itu sendiri.

Disamping perkembangan kondisi eksternal diatas, upaya penerapan pembangunan infrastruktur masih harus dihadapkan pada pekerjaan rumah masa lalu terutama isu infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan upaya avirmasi pengurangan dampak pembangunan waduk wadaslintang, percepatan kawasan strategis pembangunan sektor lain seperti fasilitasi kawasan agropolitan rojonoto dan pembangunan kawasan barat Kabupaten Wonosobo.

3. Kemampuan Anggaran

Sebagai kabupaten yang terus berkembang dan membutuhkan banyak sumber daya, kemampuan anggaran adalah salah satu hal yang kadang menjadi batasan dalam upaya pencapaian pembangunan infrastruktur. Time line kemampuan anggaran Kabupaten Wonosobo terlihat dalam tabel series 1.5 dibawah ini.

Tabel 1.5 Anggaran Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Anggaran (dalam jutaan rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan	979.683	1.031.048	1.144.183	1.277.146	1.432.283
2	Urusan Pekerjaan Umum	117.886	158.773	74.901	138.854	173.971
3	Urusan Penataan Ruang	260	430	678	550	5.730
	Total	118.146	159.203	75.579	139.404	179.701
	Prosentase	12,06%	15,44%	6,61%	10,92%	12,55%

B. ISU STRATEGIS

Pencapaian kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan pijakan awal dalam penyusunan analisa potensi dan permasalahan yang ada dalam rencana strategis ini. Ketersediaan infratruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Berikut pada Tabel 1.6 diuraikan

hasil kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang di Kabupaten Wonosobo selama periode 2011-2014.

Tabel 1.6 Kinerja Infrastruktur Periode 2011 – 2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Prosen Penduduk Berakses air bersih	64,23	76,5	80,45	83,53	85,34
Prosen Jalan dalam Kondisi Baik	65,25	66,24	62,28	54,12	57,19
Prosen Luas Irigasi Kabupaten Wonosobo Kondisi Baik	64,99	71,05	70,8	72,75	70,49
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	44,16	44,16	38,57	39,12	
Perda RTRW	1	1	1	1	
Dokumen RDTR	7	10	13	13	
Ketaatan pada RTRW	15	15	25	35	

Mengutip analisa pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo maka beberapa hal penting menjadi perhatian sebagai dasar pijakan penyusunan program dan kegiatan kedepan.

Pengolahan sumber daya air merupakan faktor penting baik dalam upaya penyediaan air sebagai air teknis pengairan maupun air sebagai bahan baku air minum . Air minum yang layak sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, kualitas air minum yang layak ditetapkan harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan kimiawi, persyaratan mikrobiologis. Berdasarkan data akses air minum layak di Kabupaten Wonosobo, persentase air minum layak setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang hanya 64,23% menjadi 84,61% pada tahun 2014. Hal ini berarti, pemerintah Kabupaten Wonosobo masih memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas air minum sekitar 15,39% rumah tangga yang belum bisa mengakses air minum layak. Kebutuhan air minum layak Kabupaten Wonosobo semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Permasalahan penyediaan air bersih di Kabupaten Wonosobo saat ini tidak saja hanya mencakup kuantitas tetapi juga kualitas dan kontinuitas Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan

drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya bottle neck (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Secara rinci proyeksi permasalahan utama bidang infrastruktur dan tata ruang sebagaimana RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
- b) Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan di bidang tata ruang
- c) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
- d) Penggunaan Lahan masih belum sesuai tata ruang wilayah. Penggunaan lahan di kawasan Dieng yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian, meskipun seharusnya sebagai kawasan konservasi
- e) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum optimal
- f) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- g) Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi masih kecil. Tahun 2015 hanya mencapai 45,95%, sementara yang mengakses sanitasi layak baru 21,01%
- h) Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar hampir seluruh wilayah. Data tahun 2015 hanya 56% jalan yang kondisinya baik dan sedang.
- i) Akses transportasi umum belum tersebar di semua wilayah dan belum nyaman, sehingga masyarakat Wonosobo terbiasa menggunakan motor daripada moda transportasi umum
- j) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- k) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang belum optimal;

Sedangkan isu strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam RPJMD dijabarkan sebagai berikut :

(a) Pemenuhan Kualitas infrastruktur Jalan Yang Belum Optimal

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur

yang utama dan mendesak ditangani yaitu infrastruktur jalan, jembatan, drainase jalan. Isu yang sangat mendesak yaitu kualitas jalan kabupaten yang belum optimal dan cepat rusak. Pada kondisi 2015, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang yaitu baru mencapai 57,19%. Oleh karena itu, dalam periode 5 (lima) tahun mendatang, perlu adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan lainnya. Selanjutnya terkait dengan kewenangan, maka perlu ada penetapan Keputusan Bupati tentang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk jalan yang menjadi kewenangan desa, Pemerintah Kabupaten akan mencoba memberikan pendampingan teknis terkait standar pembangunan jalan.

Di samping itu, Penerapan strategi perencanaan dan teknologi tepat guna dalam penanganan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo dimasa yang akan datang adalah suatu keharusan mengingat tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah sumberdaya yang semakin mahal dan menipis namun kebutuhan yang akan terus berkembang. Hal ini terutama harus diterapkan pada saat pemilihan teknologi untuk pembangunan jalan kabupaten. Jika tidak dilakukan penerapan teknologi ini maka kualitas infrastruktur jalan akan cepat rusak. Pada jalan-jalan kabupaten yang berada pada kawasan rentan gerakan tanah seperti di wilayah Kaliwiro, Wadaslintang, Kalibawang, Sukoharjo, Watumalang dan Kejajar, maka teknologi penanganan jalannya haruslah lebih spesifik, misal dengan beton dan senderan yang kuat.

(b) Belum Optimalnya Pengelolaan Drainase Lingkungan

Pada beberapa lingkungan permukiman masih terbatas sarana drainase lingkungan, atau jika sudah ada, namun berfungsi ganda sekaligus sebagai saluran air limbah domestik. Di samping itu pada drainase lingkungan permukiman yang terhubung drainase perkotaan terhambat oleh ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan, sehingga menyebabkan limpasan pada jalan terutama yang tegak lurus dengan kontur.

(c) Belum Optimalnya Layanan Transportasi, Sirkulasi Lalu Lintas Dan Saranapra Sarana Perhubungan

Layanan angkutan umum belum nyaman dan rute trayek angkutan belum optimal, baik angkutan perkotaan dan perdesaan. Selain itu, hampir sebagian besar trayek angkutan menuju pusat Kota Wonosobo. Jadi, beban Kota Wonosobo menjadi sangat tinggi. Hal ini juga terkait dengan penyebaran fasilitas layanan publik, yang secara hirarki masih banyak di pusat Kota Wonosobo. Di samping itu, pada jalur nasional Ruas Buntu Pringsurat yang terdapat di wilayah Kabupaten Wonosobo ada yang termasuk jalur maut rawan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan black spot utamanya di simpang pasar Kertek., dan turunan Candimulyo-Pasar Kertek. Terkait

penataan transportasi, yaitu pada periode tertentu, di Simpang Pasar Kertek terjadi kemacetan.

Demikian pula di kawasan Kota Wonosobo juga terjadi kemacetan. Penanganan kemacetan dapat dilakukan dengan pengalihan jalur, dan penyebaran pusat pertumbuhan dan layanan publik yang tidak hanya di pusat kota. Selain itu, ada beberapa terminal yang belum optimal fungsinya. Masih ditemuinya areal pangkal kendaraan ilegal atau terminal bayangan. Hal ini ditambah dengan kondisi sebagian besar badan jalan digunakan sebagai parkir on street. Hal utama juga yang perlu diperhatikan nantinya yaitu penataan parkir, penyediaan gedung parkir dan kantong-kantong parkir, penataan trayek angkutan, pengaturan sirkulasi lalu lintas. Di samping itu, umumnya, pada jalan di luar perkotaan yang pada kondisi topografi berbukit seperti di Kecamatan Watumalang, Sukoharjo, Kepil, Kalibawang, Kaliwiro membutuhkan tambahan pengaman berupa guard rail.

(d) Kualitas Infrastruktur Wilayah Lainnya Yang Belum Optimal

Infrastruktur wilayah non jalan yang juga harus mendapatkan perhatian terkait pemenuhan layanan infrastruktur seperti jaringan irigasi, drainase permukiman. Sektor pertanian masih mendominasi sebagai penyumbang PDRB terbesar. Pertanian jug masih merupakan matapencaharian utama penduduk Kabupaten Wonosobo. Dukungan penanganan jaringan irigasi untuk mendukung tumbuhnya sektor pertanian juga mutlak diperlukan. Meskipun, secara fisik, wilayah Kabupaten Wonosobo bukan merupakan lumbung pangan padi, namun dukungan penyediaan pangan padi juga bisa dibilang tidaklah kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kebijakan nasional kedaulatan pangan, penanganan jaringan irigasi harus dilakukan dengan baik. Berdasarkan data hasil interpretasi citra satelit tahun 2015, tutupan lahan berupa sawah seluas 14.854 hektar dengan klasifikasi sawah padi diselingi tanaman lain/bera seluas 11.695 hektar dan sawah dengan padi terus menerus hanya seluas 3.159 hektar. Sementara itu, jaringan irigasi dalam kondisi baik sebanyak 70,49%.

(e) Kendala Limitasi dan Keterisolasian Wilayah

Secara fisik Kabupaten Wonosobo dengan topografi bergelombang hingga bergunung, dan terbatasnya wilayah datar menjadikan wilayah ini memiliki limitasi pengembangan wilayah. Namun demikian, terkait dengan arahan pengembangan wilayah dengan melihat analisis kemampuan lahan, hanya diarahkan pada kawasan budidaya. Selain, itu secara posisi geografis yang terletak di tengah Pulau Jawa, dan juga dengan kendala topografis menjadikan wilayah Wonosobo, perkembangannya tidak secepat yang berada di jalur pantura maupun jalur lintas selatan. Namun demikian, perlu perhatian khusus dalam mengatasi kendala keterisolasian wilayah.

- (f) Dilalui jalur Penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta koridor KSPN Borobudur-Dieng

Meskipun memiliki kendala limitasi wilayah, Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui tersebut.

- (g) Belum Terpenuhinya Kualitas Air Minum Sesuai Standar Kesehatan

Meskipun secara akses persentase penduduk yang mendapatkan layanan air minum sudah tinggi yaitu mencapai 85,34, kualitas air minumannya belum memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 25 % sumber mata air yang digunakan untuk penyediaan air minum/bersih masyarakat tidak memenuhi standar kesehatan. Sumber air tersebut tercemar bakteri e-coli.

- (h) Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Sanitasi

Persentase penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi masih rendah yaitu hanya sekitar 47,95%. Akses sanitasi ini menjadi isu strategis karena termasuk layanan dasar yang juga harus diterima penduduk dan merupakan kebijakan nasional dalam program 100-0-100.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Wonosobo yang merupakan gambaran arahan kebijakan pembangunan kedepan Kabupaten Wonosobo pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021. Gambaran tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005–2025 (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap III) dan RPJMNTahun 2015–2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 dan RTRW Kabupaten Wonosobo 2011–2031 juga merupakan visi misi utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021.

A. VISI

TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

Visi Pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang ASRI dan Bermartabat.

B. MISI

Visi pembangunan tersebut diatas akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan kemandirian daerah
4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah.

Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tugas utamanya adalah melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang, sejalan dengan misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (5) mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan memadai maka misi dalam RPJMD

Kabupaten Wonosobo yang menjadi tuntunan teknis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah misi (4) Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya.

C. TUJUAN

Sejalan dengan misi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya maka tujuan umum pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terpadu untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan strategis cepat tumbuh daerah, kawasan strategis ekonomi dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung ketahanan air dan pangan serta pembangunan yang berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk konektivitas antar kawasan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing daerah yang berfokus pada keterpaduan konektivitas wilayah;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung pembinaan dan ketaatan terhadap rencana tata ruang dan wilayah;
6. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis umum yang dikembangkan adalah percepatan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terpadu untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan strategis cepat tumbuh daerah, kawasan strategis ekonomi dan kawasan perdesaan;

Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan dari kabupaten, kecamatan dan desa
- b) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c) Meningkatnya program avirmasi pembangunan sarana permukiman pada kawasan tertinggal

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung ketahanan air dan pangan serta pembangunan yang berkelanjutan;

Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pengairan dengan sasaran lahan produktif pertanian dan lumbung pangan desa
- b) Meningkatnya upaya pembagunan berwawaskan lingkungan (eco-distrik)

3. Menyelenggaraaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk konektivitas antar kawasan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing daerah yang berfokus pada keterpaduan konektivitas wilayah;

Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kemantapan kondisi jalan
- b) Meningkatnya dukungan pembangunan konektivitas kawasan produktif

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas dan cakupan pembangunan infrastruktur permukiman
- b) Meningkatnya implementasi aksesibilitas sarana prasarana yang mengedepankan layanan untuk kaum difable dan masyarakat berkebutuhan khusus

5. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung pembinaan dan ketaatan terhadap rencana tata ruang dan wilayah;

Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Meningkatnya integrasi rencana tata ruang dan wilayah pada berbagai sektor strategis pendukung pembangunan
- b) Meningkatnya sosialisasi kebijakan dalam rencana tata ruang dan wilayah secara lebih luas

6. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
- b) Meningkatnya sumberdaya manusia yang kompeten
- c) Meningkatnya budaya kerja yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- d) Meningkatnya kualitas pengelolaan aset, data dan informasi publik

III. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)

Pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas dengan tolok ukur indikator panjangnya masa ekonomis infrastruktur menjadi salah satu target yang dilakukan. Dengan mematangkan perencanaan teknis dan perhitungan rencana beban lalu lintas yang ada diharapkan target peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dapat dicapai. Penggunaan perkerasan beton menjadi pilihan upaya peningkatan kualitas jalan strategis.

Pembangunan jalan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip penanganan tuntas ruas yang diartikan penanganan total sesuai kebutuhan pada ruas jalan prioritas sampai dengan dicapainya fungsi ekonomis jalan.

Penanganan drainase ditingkatkan pada wilayah perkotaan dengan mengedepankan prinsip eco-drain. Pembangunan drainase perkotaan sejalan dengan upaya perbaikan fungsi trotoar dan juga melakukan reposisi saluran drainase sehingga dapat emberikan lahan tanam untuk pengembangan jalur hijau.

2. Memperbesar aksesibilitas wilayah

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan mengambil sasaran dan fokus mendukung sektor strategis lainnya seperti pengembangan sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan dan pengembangan wilayah.

Pembangunan jalan diprioritaskan pada penyelesaian jalan lingkar waduk wadaslintang yang merupakan upaya pengurangan dampak pembangunan waduk wadaslintang pada tahun 1980an. Selain itu prioritas utama adalah pembangunan jalan alternatif yaitu jalan lingkar dalam kertek dan jalur lingkar luar kertek yang merupakan peningkatan kapasitas jalan keseneng candiyasan yang mengakses jalan lingkar utara.

Dalam rangka mendukung sektor pariwisata, pembangunan ruas jalan rake sanjaya dan rake panangkaran menjadi prioritas dalam rangka mendukung pembangunan industri pariwisata sesuai dengan wilayah KSPN Borobudur – Dieng.

3. Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman

Percepatan sanitasi dilakukan dengan penanganan sistem komunal maupun perorangan. Upaya penanganan sanitasi dilakukan pula pengembangan strategi pengembangan program program avirmasi dengan desa serta absorpsi program pusat maupun swasta melalui kemitraan.

4. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kinerja pengelolaan air minum dilakukan dengan upaya sinkronisasi rencana pengembangan spam kabupaten yang mengakomodir barbagai stakeholder diantaranya pengelola spam desa dan PDAM.

5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang bagi kawasan pemukiman

Riview Rencana Tata Ruang dan Wilayah menjadi prioritas pemerintah daerah disamping itu pengembangan kawasan tematik dilakukan melalui penyusunan RTBL.

IV. TARGET KINERJA

1. Meningkatkan Capaian Kinerja dan Pemajuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2)

Permendagri 13/2016	Indikator Program	Capaian Kinerja 2015	Target 2021	Kegiatan Pokok	Bidang DPUPR
Program Peningkatan Layanan Publik	Prosentase Penerapan SSO dan SOP pada PD	52%	100%	Fasilitasi Survey Kepuasan Publik	Bidang Bina Program
		60%	100%	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	Bidang Bina Program
	Afirmasi kebijakan dan implementasi infrastruktur Ramah HAM	0%	100%	Sosialisasi, deseminasi dan revitalisasi standar aksesibilitas sarana dan prasarana umum	Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Program
				Pengembangan Kecamatan Prima Ramah HAM	Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Program
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	75%	100%		Bidang Bina Program

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Yang Merata (4)

Permendagri 13/2016	Indikator Program	Capaian Kinerja 2015	Target 2021	Kegiatan Pokok	Bidang DPUPR
Program Pengembangan Perumahan	Kekurangan tempat tinggal (Backlog) berdasarkan perspektif penghuni	34416	29415	Penyusunan kebijakan/regulasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	Bidang Cipta Karya
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	7%	10%	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Bidang Cipta Karya
				Penyusunan Kebijakan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Program
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum layak	85,34%	100%	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi MBR	Bidang Cipta Karya
	Prosentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL Komunal	1,95%	3,75%	Kolaborasi Penyediaan Air Minum Layak	Bidang Cipta Karya

Permendagri 13/2016	Indikator Program	Capaian Kinerja 2015	Target 2021	Kegiatan Pokok	Bidang DPUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase desa memiliki BPSPAM	42%	0,56%	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Bidang Cipta Karya
	Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1,46%	40%	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum	Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Program
	Prosentase Penduduk Berakses Sanitasi	48%	100%	Fasilitasi Pembentukan Pengembangan dan Pembinaan BPSPAM	Bidang Cipta Karya
				Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah	Bidang Cipta Karya
				Pembangunan Sistem Air Minum	Bidang Cipta Karya
				Pembangunan IPAL	Bidang Cipta Karya
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan/Rumah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang	30%	20%	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Bidang Penataan Ruang
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Prosentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal	82%	90%		Bidang Cipta Karya

Permendagri 13/2016	Indikator Program	Capaian Kinerja 2015	Target 2021	Kegiatan Pokok	Bidang DPUPR
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	54%	65%	Peningkatan kualitas jalan penghubung antar kawasan perdesaan	Bidang Bina Marga
	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	9.56%	17%	Pembangunan Jalan Strategis Kaupaten	Bidang Bina Marga
	Prosentase jumlah jembatan kondisi baik	73,5%	85%	Pembangunan jembatan penghubung jalan kabupaten	Bidang Bina Marga
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan	60%	75%	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan/ jembatan kabupaten	Bidang Bina Marga
	Prosentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan jalan pertahun	5%	25%	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan/ jembatan kabupaten	Bidang Bina Marga
	Prosentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi pertahun	16%	22%	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan/ jembatan kabupaten	Bidang Bina Marga
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/peme riksaan rutin	0,6	0,75	Inspeksi/pemerik saan kondisi jalan kabupaten	Bidang Bina Marga
	Rasio ruas jembatan yang telah dilakukan inspeksi/peme riksaan rutin	1	1	Inspeksi/pemerik saan kondisi jembatan kabupaten	Bidang Bina Marga

	Prosentase panjang jalan yang dileger	10%	60%	Penyusunan sistem informasi jalan dan pengadaan leger jalan	Bidang Bina Marga
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	0,8	1	Rehabilitasi jalan pada masa tanggap darurat	Bidang Bina Marga
	Rasio panjang jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	1	1	Rehabilitasi jembatan pada masa tanggap darurat	Bidang Bina Marga
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong	Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang	0,57	0,8	Pembangunan saluran drainase jalan	Bidang Bina Marga
	Prosentase penurunan jumlah titik genangan (luasan limpasan saluran) pada jalan utama perkotaan	0,3	0,3	Pemeliharaan Rutin saluran drainase perkotaan	Bidang Bina Marga
	Prosentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	57%	80%	Pembangunan turap/talud/ bronjong	Bidang Bina Marga

Permendagri 13/2016	Indikator Program	Capaian Kinerja 2015	Target 2021	Kegiatan Pokok	Bidang DPUPR
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	0,705	0,8	Pembangunan dan oeningkatan jaringan irigasi	Bidang Sumber Daya Air
	Rasio jaringan irigasi	0,0714	0,1	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten	Bidang Sumber Daya Air
	Prosentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten	67,27%	70%		Bidang Sumber Daya Air
	Prosentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	70,07	75%		Bidang Sumber Daya Air
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase jalan lingkaran baru yang terbangun terhadap rencana jalan lingkaran yang ditetapkan	0	100%	Pembangunan jalan lingkaran kertek Pembangunan Jalan Rake Sanjaya Pembangunan Jalan Rake Panangkaran	Bidang Bina Marga
	Prosentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	100%	100%	Pembangunan jalan Keseneng - Candiyan Pembangunan jalan lingkaran garung Pembangunan jalan lingkaran kalibeber	Bidang Bina Marga

3. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah (5)

Permendagri 13/2016	Indikator Program	Capaian Kinerja 2015	Target 2021	Kegiatan Pokok	Bidang DPUPR
Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	68,75%	100%	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Bidang Penataan Ruang
	Prosentase RDTR yang dilegalisasi	0	53%	Penetapan kebijakan tentang RDTRK RTBL	Bidang Penataan Ruang
				Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Bidang Penataan Ruang
				Penyusunan RTBL Kawasan Khusus (Pusaka)	Bidang Penataan Ruang
				Revisi Rencana Tata Ruang	Bidang Penataan Ruang
				Implementasi Garden City dan Ecodistrik	Bidang Penataan Ruang
				Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	Bidang Penataan Ruang

Permendagri 13/2016	Indikator Program	Capaian Kinerja 2015	Target 2021	Kegiatan Pokok	Bidang DPUPR
Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase luas permukiman yang tertata	76%	90%	Optimalisasi layanan informasi dan konsultasi penataan ruang	Bidang Penataan Ruang
	Prosentase RDTR yang direkomendasi BIG	0	100%	Survey Pemertaan untuk penyusunan rencana detail tata ruang	Bidang Penataan Ruang
				Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Bidang Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	2,66%	60%	Internalisasi IMB	Bidang Penataan Ruang
				Optimalisasi BKPRD dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih optimal	Bidang Penataan Ruang
				Pengawasan pemanfaatan ruang	Bidang Penataan Ruang
Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Prosentase luas lahan rusak akibat pertambangan	0,022	0,017	Monitoring pelaporan kegiatan pertambangan rakyat	Bidang Penataan Ruang
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber	Prosentase panjang sempadan sungai uatam berupa ruang terbuka hijau	88%	88%	Penataan bantaran sungai	Bidang Sumber Daya Air

Daya Air Lainnya					
				Fasilitasi pembangunan waduk, embung dan bendung	Bidang Sumber Daya Air
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Prosentase PLTMH yang beroperasi	1,43	7,14	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan teknologi pemanfaatan energi hidro	Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Program
				Pengembangan Desa Mandiri Energi	Bidang Bina Program
				Penyusunan kebijakan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi	Bidang Bina Program dan Bidang Penataan Ruang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana				Peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana	Bidang Bina Marga

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)					Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		2017	2018	2019	2020	2021		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.1.03.1.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang; Rasio drainase lingkungan permukiman kondisi baik dan sedang; Persentase jalan lingkungan permukiman perkotaan yang dilengkapi saluran drainase; Persentase penurunan Jumlah titik genangan (luapan limpasan saluran) pada jalan utama perkotaan; Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	0.685; 0.445; 86; 8; 68.5					3,850,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00		
1.03.1.03.1.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Terbangunnya saluran drainase jalan S.Parmar Terbangunnya drainase Jalan Soekarno-Hatta Pembangunan Drainase Jalan Durensawit Manggis Kec Leksono Pembangunan Drainase dan Senderan Ruas Jalan Pacarmulyo - Limbangan Kec. Leksono Pembangunan Drainase Pasar dan Terminal Kaliwiro Kec. Kaliwiro Pembangunan Drainase Jalan Pucungwetan - Tlogo Kec. Sukoharjo Pembangunan Drainase Ruas Jalan Ngalian - Kalidadap Kec. Wadaslintang Pembangunan Drainase Jalan Karangduwur Kec. Kalikajar Pembangunan Drainase Selomerto - Gunungtawang Kec. Selomerto Pembangunan Drainase Selomerto - Gunungtawang Kec. Selomerto Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan			Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang	0.8	3,350,000,000.00	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	
1.03.1.03.1.16.06	pemeliharaan rutin saluran drainase perkotaan			Pemeliharaan rutin drainase perkotaan	1 tahun	Prosentase penurunan jumlah titik genangan (luasan limpasan saluran) pada jalan utama perkotaan	0.3	500,000,000.00	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000		
1.03.1.03.1.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemandapan jalan; Persentase Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun; Persentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi per tahun	65; 8; 20					15,050,000,000.00	15,050,000,000.00	15,050,000,000.00	15,050,000,000.00	15,050,000,000.00		
1.03.1.03.1.18.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Terehabilitasinya/terpeliharanya pedestrian jalan kabupaten		Prosentase panjang pedestrian jalan yang dilakukan pemeliharaan jalan pertahun	75%	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00		
1.03.1.03.1.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan		Prosentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan jalan pertahun	25%	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00		
1.03.1.03.1.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan			Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan		Prosentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi pertahun	22%	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
1.03.1.03.1.20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin; Rasio jembatan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin; Persentase panjang jalan yang dileger	0.675; 0; 1					950,000,000.00	950,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		
1.03.1.03.1.20.01	inspeksi kondisi jalan			Terlaksananya inspeksi kondisi jalan kabupaten		Rasio ruas jalan dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin	0.75	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00		
1.03.1.03.1.20.02	inspeksi kondisi Jembatan			Terlaksananya inspeksi/pemeriksaan kondisi jembatan kabupaten		Rasio ruas jembatan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin	1	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00		
1.03.1.03.1.20.04	Pembuatan Leger Jalan			Terlaksananya leger jalan				750,000,000.00	750,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
1.03.1.03.1.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan							300,000,000.00	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
1.03.1.03.1.22.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan			Tersusunnya sistem informasi jalan				300,000,000.00	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
1.03.1.03.1.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan							6,500,000,000.00	9,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)					Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		2017	2018	2019	2020	2021		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.05.1.03.1.24.11	Pembangunan Taman RT			Terbangunnya Ruang Terbuka Publik Lingkungan Pendopo Timur		Bertambahnya Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan		2,500,000,000.00	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	
				Terbangunnya Ruang Terbuka Publik Ramah Anak										
				Terbangunnya Ruang Terbuka Publik Sindoro-Sumbing										
2.10.1.03.1	Urusan Komunikasi dan Informatika													
2.10.1.03.1.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blue print TIK; Presentase SKPD yang menerapkan e-Government	50%; 50%					100,000,000.00	300,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	
2.10.1.03.1.19.13	Pengembangan SIPIAKI			Fasilitasi Penyelenggaraan SIPIAKI	Koordinasi dan fasilitasi	Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pasa Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPIAKI)	100%	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
2.10.1.03.1.19.23	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Internal pelaksanaan kegiatan perkantoran			Aplikasi Sistem Pengendalian Manajemen Internal	1 software/ aplikasi	Terselenggaranya manajemen internal perkantoran yang baik	100%	0.00	200,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
4.03.1.03.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan													
4.03.1.03.1.16	Program Kerjasama Pembangunan							150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	
4.03.1.03.1.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah			Fasilitasi kemitraan strategis bidang infrastruktur		Meningkatnya persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	
4.03.1.03.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian Program dalam RKPd dengan program dalam RPJMD; Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPd; Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Presentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu; Persentase serapan kegiatan dan anggaran	100%; 100%; 100%; > 3 (sangat tinggi); 100%; 100%					485,000,000.00	485,000,000.00	485,000,000.00	485,000,000.00	485,000,000.00	485,000,000.00	
4.03.1.03.1.21.13	Fasilitasi Perencanaan dan Monev pembangunan daerah			Fasilitasi kegiatan evaluasi monitoring dan pelaporan bidang ke PU an		Meningkatnya persentase serapan kegiatan dan anggaran		250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	
4.03.1.03.1.21.31	Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur			Fasilitasi kegiatan perencanaan teknis bidang ke PU an	5 UPTD	Meningkatnya kualitas dan jumlah output perencanaan teknis infrastruktur		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen AHSP			Fasilitasi Kegiatan AHSP		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran Belanja Konstruksi		75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	
4.03.1.03.1.25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana; Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana; Persentase Desa Rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system) ; persentase dokumen rencana kontinjensi yang tersusun terhadap total jenis bencana; rapor ketangguhan bencana; Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi	56.5%; 11%; 45%; baik; 56.25%					4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
4.03.1.03.1.25.08	peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana			Meningkatnya kualitas jalur evakuasi bencana Gunung Berapi (Sindoro)		Meningkatnya nilai rapor ketangguhan bencana		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
TOTAL								211,335,000,000.00	333,435,000,000.00	272,505,000,000.00	229,680,000,000.00	215,805,000,000.00		